

STRATEGI PERAN TNI-POLRI GUNA MENDUKUN TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Oleh :

Humitar Siagian¹⁾, Andik Triayuli²⁾, I Wayan Budi Santosa³⁾, Yuswari O Djemat⁴⁾, Riski Budianto⁵⁾

^{1,2,3,4,5} Prodi Strategi Operasi Darat, Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

¹email: Humitarsiagian99@gmail.com

²email: AndikRau12@gmail.com

³email: ymekanis38@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 22 Agustus 2024

Revisi, 3 Oktober 2024

Diterima, 17 Desember 2024

Publish, 15 Januari 2025

Kata Kunci :

Peran TNI-Polri,
Transformasi Ekonomi,
Pemulihan Ekonomi Nasional.

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 menjadi permasalahan serius yang sedang dihadapi seluruh dunia, termasuk Indonesia di mana berdampak luas baik terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. TNI Polri sebagai salah satu kekuatan Bangsa turut berperan serta dalam membantu permasalahan bangsa serta mendukung program pemerintah untuk menangani dan mengatasi permasalahan yang ada. Peran TNI Polri beserta komponen bangsa lainnya bekerja sama dalam rangka menciptakan Bangsa yang kuat dan unggul dalam terwujudnya Indonesia Tangguh yang berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, peran TNI-Polri dan komponen bangsa lainnya belum optimal, sehingga didalam meningkatkan peran TNI-Polri diharapkan dapat tercapai: *Pertama*, Pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing institusi. *Kedua*, Meniadakan gesekan kepentingan secara personal dalam melaksanakan tugas. *Ketiga*, Meningkatkan pemantapan Nilai Kejuangan dan semangat pengabdian diharapkan peran TNI-Polri akan mampu dan efektif Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menjamin kelangsungan pembangunan nasional. Dan keempat tercapai semangat kebersamaan antar kedua institusi dalam melaksanakan kerjasama dalam pelaksanaan tugas secara sinergi menciptakan keamanan dan ketertiban sangat diharapkan sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Humitar Siagian

Afiliasi: Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat

Email: armiking08@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 menjadi permasalahan serius yang sedang dihadapi seluruh dunia, termasuk Indonesia di mana berdampak luas baik terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menanganinya tidak terlepas dari pemulihan ekonomi nasional. TNI Polri sebagai salah satu kekuatan Bangsa turut berperan serta dalam menangani dan mengatasi *pandemi Covid-19* yang merupakan suatu ancaman, hambatan, dan tantangan bagi bangsa Indonesia guna mendukung

berlangsungnya pemulihan perekonomian dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Pemerintah terus berupaya melakukan transformasi ekonomi dengan fokus pemanfaatan potensi desa atau pinggiran sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah yang nantinya berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Transformasi tersebut memerlukan jembatan berupa teknologi untuk mendukung hilirisasi semua sektor. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam arahannya pada Rapim TNI-Polri Tahun 2023 di Jakarta.

Transformasi ekonomi memiliki 5 pilar untuk mencapai keberhasilan, yaitu mencakup tentang optimalisasi infrastruktur, pemerataan ekonomi, minimalisasi modal asing, efisiensi tenaga kerja serta konfigurasi investasi.

Peran TNI Polri beserta komponen bangsa lainnya bekerja sama dalam rangka menciptakan Bangsa yang kuat dan unggul dalam terwujudnya Indonesia Tangguh yang berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penanganan *Covid-19* dan pemulihan ekonomi tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, tetapi perlu adanya kolaborasi dan kerjasama antara TNI Polri serta berbagai komponen Bangsa lainnya. Peran TNI Polri dalam mendukung dan mengupayakan percepatan dalam penanganan *Covid-19* serta pemulihan ekonomi nasional sangat dibutuhkan. Seperti yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo saat Rapim TNI Polri Tahun 2021, untuk berperan aktif dalam mendukung iklim usaha dan investasi yang kondusif sehingga terciptanya pemulihan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, apabila kita melihat realitasnya masih terjadi permasalahan yang masih dihadapi menyangkut masih rendahnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing institusi, terjadinya gesekan kepentingan secara personal, menurunnya nilai-nilai kejujuran dan semangat pengabdian serta terjadinya degradasi semangat kebersamaan antar anggota kedua institusi pada level bawah. Berdasarkan adanya fakta permasalahan yang dihadapi saat ini maka diperlukan adanya rumusan kebijakan, strategi dan upaya komprehensif untuk dilakukan guna mengoptimalkan peran TNI-Polri guna mewujudkan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan, strategi dan upaya yang dilaksanakan harus diarahkan pada usaha untuk meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing institusi sampai pada level bawah, menghilangkan adanya gesekan kepentingan personal, peningkatan nilai-nilai kejujuran dan semangat pengabdian serta meningkatkan semangat kebersamaan antar anggota kedua institusi. Sehingga diharapkan dapat terwujud peran TNI-Polri bersama komponen bangsa lainnya guna mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga pada akhirnya dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiono (201*Kelima*), metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Tipe penelitian ini berusaha menerangkan fenomena sosial tertentu. Sugiono juga menjelaskan Penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, berdasarkan

kriteria pembedaan antara lain fungsi akhir dan pendekatannya metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Sugiyono (2010) mendeskripsikan 3 desain metodologi kualitatif antara lain desain deskriptif kualitatif, desain kualitatif verifikatif dan desain *grounded research*. Pada penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dimana desain ini menjawab berbagai pertanyaan strategi peran TNI-Polri guna mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Sumber data didapat dari data primer yang diperoleh dari narasumber dan data sekunder yang bersumber dari literatur, laporan satuan sampai dokumen-dokumen resmi lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan studi kepustakaan, melalui analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus menerus mulai dari sebelum, selama dan setelah selesai penelitian dilakukan.

Kerangka teoritis penelitian ini dihadapkan pada kondisi historis TNI dan Polri sebagai bagian integral dari perjuangan bangsa selalu berperan aktif mengingat TNI maupun Polri lahir dari kanvas perjuangan bangsa Indonesia. Dalam setiap episode perjuangan yang dilaksanakan, baik TNI maupun Polri senantiasa memelihara kelangsungan hidup bangsa agar perjuangan yang telah dikristalkan dalam proklamasi kemerdekaan tetap terjaga dan terjaga dari rongrongan yang ingin merobek-robek hasil perjuangan. Sejak kelahirannya TNI berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal itu sejalan dengan tugas pokoknya untuk selalu menjaga kedaulatan NKRI. Demikian juga pada periode reformasi banyak yang dilakukan TNI dan Polri dalam upaya memberikan kontribusinya pada bangsa dan negara. TNI maupun Polri telah memberikan kontribusinya sesuai kemampuan, kompetensi dan profesinya dalam perjuangan bangsa untuk mempertahankan, menegakkan dan mengisi kemerdekaan. Sejak reformasi bergulir, eksistensi TNI dan Polri selalu mendapat sorotan dan hujatan dari berbagai kalangan di tengah masyarakat. Mencermati kondisi yang berkembang dihadapkan dengan peran, fungsi dan tugas pokok TNI dan Polri sebagai aparat keamanan yang harus dipertanggung

jawabkan kepada bangsa dan negara maka kedua institusi tersebut dituntut untuk saling membantu dalam mengatasi gangguan keamanan di setiap jengkal wilayah NKRI.

Kerangka Teoritis sebagai grand theory adalah teori peran. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Selanjutnya teori sinergitas. Hubungan antara dua pihak dapat menghasilkan tingkatan komunikasi bila dihadapkan pada elemen kerjasama dan kepercayaan. Dari tingkatan komunikasi akan menghasilkan tiga tingkatan kerja sama, meliputi : 1) *Defensif*. Tingkat kerja sama dan kepercayaan yang rendah akan mengakibatkan pola komunikasi yang bersifat pasif / defensif; 2) *Respectfull*. Tingkat kerja sama dan kepercayaan yang meningkat memunculkan suatu pola komunikasi yang bersifat kompromi dan saling menghargai. 3) *Sinergistic*. Dengan kerja sama yang tinggi serta saling mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat sinergisitas yang berarti kerja sama yang terjalin akan menghasilkan output yang lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pemulihan ekonomi nasional dihadapkan dengan permasalahan kompleks pasca Covid-19 serta keadaan lingkungan strategis global perang Rusia-Ukraina memberikan pengaruh terhadap pasokan energi dan pangan walaupun tidak signifikan. Seiring dengan ini, maka upaya untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan perlu untuk terus dilakukan evaluasi dan pembaharuan, sehingga mampu mencapai formula perekonomian nasional

yang ideal saat ini maupun dimasa yang akan datang salah satunya melalui Peran TNI-Polri bersama komponen bangsa lainnya. Namun saat ini peran TNI-Polri belum optimal dikarenakan beberapa permasalahan yang ada meliputi belum adanya pemahaman yang sama terhadap tugas dan fungsi masing-masing institusi terkait tugas-tugas keamanan khususnya di level bawah, masih banyak terjadi gesekan kepentingan secara personal, bergesernya nilai-nilai kejujuran dan semangat pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri dan belum adanya semangat kebersamaan dalam membangun peran TNI-Polri.

Pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing institusi.

Kejelasan konseptual, legalitas dan tindakan faktual terhadap solusi permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada perbaikan ekonomi pasca Covid-19 dan resesi ekonomi akibat perang Rusia-Ukraina. Disamping hal tersebut masalah keamanan menjadi faktor yang harus diselesaikan karena selama ini penanganan terhadap berbagai kasus yang mengancam keamanan ternyata belum memadai. Tingginya angka kejahatan di tengah-tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki aparat Polri, seperti sumber daya manusia, sarana prasarana serta anggaran, tentu mendorong perlunya TNI untuk ikut terlibat di dalamnya. Lebih lanjut lagi urgensi permasalahan perbaikan ekonomi harus didukung oleh kerjasama kedua instansi TNI-Polri bersama komponen bangsa lainnya agar transformasi ekonomi bisa berjalan dengan optimal. Disamping menjaga kondusifitas Kamtibmas keberadaan TNI-Polri harus memiliki rasa kepedulian tinggi terhadap bangsa Indonesia dimulai dari tingkat daerah. Namun dalam pelaksanaan tugas pihak Polri dengan Polmasnya tidak mudah untuk diimplementasikan, terbukti dalam praktiknya banyak kendala yang dihadapi, di antaranya: masih muncul pemikiran sempit dari sebagian anggota masyarakat bahwa Polmas dibentuk sebagai upaya menandingi Bintara Pembina Masyarakat (Babinsa) yang dibentuk oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Akibat cara pandang seperti ini memunculkan sikap saling curiga mencurigai di antara kedua institusi terkait dihadapkan pada pelaksanaan tugas untuk membantu kesulitan masyarakat juga dalam menjaga Kamtibmas. Cara pandang sempit demikian tentu menyebabkan munculnya kondisi disharmonis antara Polisi dan TNI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya guna mendukung peningkatan produktivitas perekonomian masyarakat.

Gesekan kepentingan secara personal dalam melaksanakan tugas.

Peristiwa bentrokan antara anggota TNI dan Polri, bukan yang pertama kalinya terjadi. Sejak 2005 hingga 2012 telah terjadi 26 kali bentrok TNI-Polri. Banyak yang berpendapat Konflik TNI dan Polri karena faktor ketimpangan dan kesenjangan. Selain itu, perilaku korup juga menjadi penyebab gesekan di

antara dua lembaga negara ini, seperti dalam kasus korupsi simultor. Konflik TNI-Polri sangat memprihatinkan. Peristiwa itu juga membuat kekhawatiran di masyarakat. Sebab, karena kedua aparat negara ini memiliki otoritas untuk menggunakan senjata api modern yang mematikan. Konflik di antara mereka dapat mengancam keamanan dan pertahanan negara. Padahal mereka seharusnya merupakan garda terdepan penjaga keamanan dan pertahanan negara. Demikian halnya dalam pelaksanaan perbantun kepada masyarakat di wilayah, dimana masih adanya kesan egosektoral, lebih mengutamakan kepentingan institusi daripada menyelesaikan permasalahan masyarakat. Permasalahan ekonomi dan kondisi sosial saat ini menjadi hal yang urgent harus segera diselesaikan, sehingga menempatkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan institusi.

Nilai-nilai kejuangan dan semangat pengabdian.

Seiring dengan semakin deras pengaruh perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional, secara jujur harus diakui bahwa persatuan dan kesatuan bangsa dewasa ini, tengah mengalami ujian dan cobaan, mengalami erosi yang harus mampu ditanggulangi dengan kerja keras. Indikasi dan implikasi dari itu semua adalah terjadinya pemudaran solidaritas sesama unsur keamanan nasional khususnya TNI dan Polri, menurunnya soliditas dan militansi bangsa dan semakin keringnya toleransi dalam kehidupan keseharian itulah potret nyata yang ada saat ini. Kenyataan masih besarnya tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, baik tantangan eksternal ataupun tantangan internal, seharusnya mengundang (memanggil) seluruh elemen bangsa termasuk TNI dan Polri untuk berbuat yang terbaik dalam pelaksanaan tugas dengan meningkatkan kerjasama dalam rangka meningkatkan stabilitas keamanan nasional. Disinilah pentingnya kita menstranformasikan nilai-nilai kejuangan, dari nilai kejuangan pada jaman pembebasan nasional (yang berujung kemerdekaan bangsa) menjadi nilai-nilai kejuangan baru di jaman globalisasi. Nilai Kejuangan ini tidak lagi didasarkan pada sentimen adanya “persaingan institusi”, melainkan didasarkan pada sentimen mewujudkan “cita-cita proklamasi”. Cita-cita proklamasi salahsatunya adalah perwujudan kesejahteraan masyarakat, sehingga TNI dan Polri bersama komponen bangsa lainnya mengaplikasikan nilai-nilai kejuangan dan semangat pengabdian hanya untuk kepentingan masyarakat.

Semangat kebersamaan.

Secara kelembagaan dua insitusi itu diberikan satu komitmen, yaitu untuk bersikap profesional pada tugas masing-masing. Namun gesekan kepentingan secara personal dalam pelaksanaan tugas masih seraing terjadi. Selama ini masih ada perkelahian, kesalahpahaman, gesekan hingga penyerangan pos polisi, dan terbaru adalah penyerangan Mapolres, terjadi pada level bawah dan tak ada instruksi

vertikal. Masalah tersebut berimbas dalam pelaksanaan tugas dimana secara personal masing-masing merasa ego dan merasa yang paling berwenang. Sesuai UU No 2 tahun 2002 tentang Polri, pada pasal 41 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara RI dapat meminta bantuan TNI yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan pada UU No 34 tahun 2004 tentang TNI, pada pasal 7 ayat 2 dimana TNI dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang diantaranya adalah melaksanakan tugas bantuan kepada Polri. Dari kedua regulasi resmi pemerintah RI tersebut sampai dengan saat ini semangat kebersamaan dalam menjalin kerjasama antara TNI dan Polri dalam pelaksanaan tugas belum terwujud. Hal tersebut berdampak terhadap peran Polri yang tidak maksimal juga menimbulkan penilaian terhadap TNI yang belum berperan seperti yang banyak diharapkan masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu adanya peninjauan kembali terhadap regulasi yang ada dengan tujuan untuk dapat mengoptimalkan peran TNI-Polri yang dilandasi semangat kebersamaan dalam meningkatkan stabilitas keamanan nasional. Kondisi perekonomian bangsa Indonesia pasca Covid-19 dan isu resesi ekonomi meningkatkan angka pengangguran hampir merata diseluruh wilayah di Indonesia, dihadapkan kondisi tersebut, kebersamaan TNI-Polri bersama komponen bangsa lainnya harus ditingkatkan, sehingga peran pencegahan dalam rangka menjaga kondusifitas Kamtibmas dilakukan melalui upaya soft power dengan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kemampuan serta peran institusi tersebut bersama dengan komponen bangsa lainnya.

Implikasi Peran TNI-Polri terhadap percepatan pemulihan Ekonomi Nasional.

Keberadaan Babinsa (TNI) dan Bhabinkamtibas dapat diberdayakan untuk mencari, mengumpulkan dan melaporkan ke masing-masing atasan terkait kondisi wilayahnya masing-masing diperhadapkan dengan permasalahan ekonomi saat ini. Hasil dari laporan tersebut ditindaklanjuti oleh unsur pimpinan untuk memerintahkan dan mengerahkan para Babinsa dan Bhabinkamtibas untuk terjun ke lapangan dan sebisa mungkin membantu permasalahan masyarakat saat ini. Salahsatu contoh adalah dengan melakukan pendampingan terhadap para petani agar hasil pangannya meningkat, dimana para Babinsa dan Bhabinkamtibas turun ke sawah dan membantu proses penanaman sampai dengan proses panen. Contoh lainnya adalah membantu secara sukarela kebutuhan-kebutuhan seperti program “Babinsa Masuk Desa” yang dapat ditunjang oleh program lain dari Polri serta keberadaan komponen bangsa lainnya yang dapat dilibatkan didalam program tersebut.

Pelaksanaan peran TNI-Polri bersama komponen bangsa lainnya harus dilandasai oleh

semangat sinergitas. Sinergitas harus mengacu pada undang-undang yang berlaku. Dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 2 disebutkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung, artinya bahwa sinergitas tugas TNI dan Polri merupakan tugas konstitusi, yang selanjutnya dijabarkan dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri pasal 41 ayat 1, dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Polri dapat meminta bantuan TNI yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Demikian juga dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI, pasal 7 ayat 2 butir 10. Tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah membantu kepolisian negara dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dengan undang-undang. Jadi sinergitas pelaksanaan tugas merupakan amanah undang-undang.

Dalam perspektif TNI dihadapkan peran guna mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dilaksanakan melalui OMSP baik membantu Polri maupun Pemda setempat serta bekerjasama dengan komponen bangsa lainnya.

Pembahasan

Makna pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuannasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu salahsatunya adalah memajukan kesejahteraan umum melalui ekonomi nasional yang stabil. Dihadapkan pada permasalahan bangsa saat ini pasca Covid-19 dan isu resesi ekonomi, TNI Polri sebagai salah satu kekuatan Bangsa turut berperan serta dalam menangani dan mengatasi pandemi Covid-19 yang merupakan suatu ancaman, hambatan, dan tantangan bagi bangsa Indonesia guna mendukung berlangsungnya pemulihan perekonomian dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Oleh karena itu Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional diharapkan peran TNI-Polri dapat dioptimalkan dalam rangka menjamin kelangsungan pembangunan nasional.

Pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing institusi.

Dalam penanggulangan ancaman dalam skala nasional diharapkan TNI dan Polri dapat lebih memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Sehingga kedua institusi tersebut dapat bersinergi dalam menghadapi berbagai permasalahan bangsa. Seperti yang diamanatkan bahwa TNI berdasarkan pada UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI pada pasal 7 ayat 2 mengamanatkan TNI untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang antara lain tugas memberikan bantuan kepada Polri dalam rangka

Kamtibmas. Dengan demikian fungsi dan tugas TNI perlu disosialisasikan di dalam institusi TNI sendiri maupun keluar agar dipahami oleh institusi Polri. Sehingga diharapkan Polri memahami fungsi dan tugas TNI dimana pada waktu pelaksanaan tugas dalam penanggulangan ancaman keamanan nasional diharapkan terwujud kerja sama dengan unsur-unsur keamanan nasional lainnya. Dalam menjamin kerjasama dan koordinasi antar institusi yang berwenang dalam penanggulangan ancaman tersebut diperlukan satu kesepahaman fungsi dan tugas masing-masing institusi sehingga pelaksanaan tugas dapat terpadu dalam memelihara dan menjaga keamanan nasional.

Gesekan kepentingan secara personal dalam melaksanakan tugas.

TNI-Polri adalah organ-organ perekat bangsa. Sehingga diharapkan kedua institusi tersebut dapat sinergis dalam pelaksanaan tugas Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Karena TNI-Polri merupakan benteng terakhir dari sebuah sistem kedaulatan bangsa. Apabila retak kedua institusi niscaya bakal pecahlah bangsa dan negara. Ini harus disadari bersama oleh segenap komponen bangsa. Sehingga diharapkan gesekan kepentingan secara personal dalam pelaksanaan tugas kedepan dapat dihindari dan ditiadakan. Pemadaman solidaritas sempit dan pengembangan ego sektoral yang kontra produktif dapat dihilangkan sehingga peran TNI-Polri dapat optimal mendukung pelaksanaan tugas dilapangan melalui kerjasama yang solid dan terpadu.

Nilai-nilai kejuangan dan semangat pengabdian.

Dengan meningkatkan pemantapan Nilai Kejuangan dan semangat pengabdian diharapkan peran TNI-Polri akan mampu dan efektif Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menjamin kelangsungan pembangunan nasional.. Mutunya sebagai pilar keamanan nasional, peran TNI-Polri harus ditingkatkan dengan melakukan Pemantapan Nilai Kejuangan TNI. Sehingga diharapkan tercapai efektivitas Daya Tangkal yang akan mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan dari dalam negeri. Selain itu dapat menjamin terhadap keamanan nasional itu dan memperkuat kondisi ketahanan bangsa bangsa untuk membangun kesejahteraan yang lebih tinggi bagi rakyat seluruhnya.

Pemantapan Nilai Kejuangan TNI juga penting untuk menghadapi ancaman terjadinya daerah memisahkan diri atau separatisme. Memang kunci utama untuk mengatasi kekhawatiran demikian ada pada Pemerintah karena menyangkut kebijaksanaan politik, ekonomi dan kebudayaan. Namun demikian, sinergitas TNI dn Polri diharapkan dapat memberikan dukungan penting dengan keberadaan unsur-unsurnya di daerah yang bermasalah. Dengan semangat, sikap dan perilaku yang tepat terhadap rakyat daerah tersebut TNI dan Polri dapat memperoleh banyak manfaat, berhasil

mengajak rakyat untuk mendukung kerjasama TNI dan Polri dalam pelaksanaan tugas.

Semangat kebersamaan.

Untuk meningkatkan semangat kebersamaan TNI dan Polri kedepan sangat diharapkan. Melalui peningkatan intensitas pertemuan TNI dan Polri merupakan silaturahmi sekaligus salah satu upaya menjalin dan mempererat kebersamaan, kekeluargaan dan sinergitas antara TNIPolri. Semangat kebersamaan yang telah terbangun dengan baik selama ini patut dipelihara dan ditingkatkan. Sinergi TNI-Polri merupakan modal utama mewujudkan pembangunan nasional. Sehingga diharapkan dengan ditingkatkannya pertemuan, kedua instansi dapat bekerja sama lebih baik lagi. Terlebih dalam waktu dekat akan menghadapi Pemilu 2024. Mengenai pengamanan Pemilu 2024, masyarakat dan unsur aparat khususnya TNI dan Polri harus bekerja sama mewujudkan keamanan dan ketertiban. Dengan demikian kerjasama TNI dan Polri secara sinergi menciptakan keamanan dan ketertiban sangat diharapkan sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman.

Kontribusi peran TNI-Polri terhadap percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Kontribusi peran TNI-Polri terhadap percepatan pemulihan ekonomi nasional. Seiring dengan tujuan reformasi nasional telah menuntut perubahan mendasar terhadap sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ke arah kehidupan nasional yang demokratis melalui penataan kelembagaan dan kesisteman termasuk didalamnya penataan ulang institusi Polri dan TNI, meliputi pemisahan kelembagaan, tugas, fungsi dan peranannya masing-masing diharapkan kedua institusi tersebut secara professional melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat keamanan nasional Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu Peran TNI-Polri sangat diperlukan karena memberikan kontribusi yang paling penting dalam menjaga dan meningkatkan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Untuk dapat melaksanakan tugas menjaga percepatan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, diperlukan adanya kordinasi dan sinergi yang mantap antara Polri dan TNI. Sinergitas kedua institusi ini dapat terwujud dengan baik melalui pola kerja sama dan koordinasi ideal yang harus terus terbangun dan ditingkatkan. Ada beberapa hal yang harus di pahami bersama seperti keterpaduan dalam melaksanakan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, selain itu hal lain yang harus dilakukan secara bersama-sama adalah adanya pembinaan keamanan kepada masyarakat khususnya pada daerah dengan potensi gangguan terhadap stabilitas keamanan yang relative tinggi, sedang maupun rendah menurut sistem pendekatan masing-masing.

Kontribusi peran TNI-Polri terhadap kelangsungan pembangunan nasional. Peran TNI-Polri merupakan proses penting dan strategis sebagai

acuan dalam pelaksanaan tugas bagi para Pengawal Bangsa dan Aparat Pemda dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan yang kondusif guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional maupun daerah. Sebagai unsur keamanan TNI maupun Polri perlu sinergis dalam menjaga keamanan lingkungan dan menciptakan kondisi yang kondusif sehingga keamanan nasional terjamin. Keamanan nasional identik dengan Hankam dan inilah merupakan konsep dari ketahanan nasional. Hakikat kepentingan nasional yang paling utama atau disebut kepentingan nasional (national interests), yang mencakup kepentingan keamanan (security) dan kepentingan kesejahteraan (wefare/prosperity). Sedangkan makna Kepentingan Nasional adalah terwujudnya Cita-Cita Nasional, dan Tercapainya Tujuan Nasional.

Optimalisasi Peran TNI-Polri Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

Strategi – 1 : Mewujudkan pemahaman yang sama terhadap tugas dan fungsi masing-masing institusi dengan implementasi peraturan dan perundang-undangan, sosialisasi peraturan dan perundang-undangan dan mengubah paradigma permintaan bantuan melalui restrukturisasi, revitalisasi, sosialisasi, edukasi, legislasi dan kerjasama serta upgrading terhadap fungsi dan tugas masing-masing institusi TNI dan Polri..

Strategi – 2 : Mewujudkan hubungan yang harmonis antar TNI dan Polri dengan melaksanakan peningkatan komunikasi, peningkatan kunjungan membangun koordinasi dengan baik antara pimpinan dan bawahan di lapangan dan peningkatan pembinaan satuan melalui sosialisasi, edukasi, pembinaan dan kerjasama masing-masing institusi TNI dan Polri..

Strategi – 3 : Mewujudkan nilai-nilai kejuangan dan semangat pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri dengan melaksanakan ceramah dan pengarahan kepada Pimpinan TNI maupun Pimpinan Polri , peningkatan pemahaman visi kerjasama, memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesamaan tekad, rasa senasib sepenanggungan keikhlasan berkorban melalui sosialisasi, edukasi, pembinaan dan kerjasama masing-masing institusi TNI dan Polri.

Strategi – 4 : Mewujudkan semangat kebersamaan dalam membangun peran TNI-Polri dengan mengeluarkan kebijakan yang dapat mendukung kerjasama yang erat antar TNI dan Polri, mensosialisasikan pemahaman kemungkinan ancaman, peningkatan efektivitas organisasi yang mewadahi kerjasama TNI dan Polri melalui restrukturisasi, revitalisasi, sosialisasi, edukasi, legislasi dan kerjasama serta upgrading terhadap fungsi dan tugas masing-masing institusi TNI dan Polri.

4. KESIMPULAN

Sistem keamanan nasional dimana TNI dan Polri merupakan elemen utama memiliki peran

penting guna mendukung program pemerintah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, perlunya koordinasi dengan unsur komponen bangsa lainnya baik instansi-instansi pemerintah ataupun dengan instansi non pemerintah lainnya guna mendapatkan bantuan maupun dukungan secara bersama-sama meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peran TNI-Polri saat ini meliputi belum adanya pemahaman yang sama terhadap tugas dan fungsi masing-masing institusi terkait tugas-tugas dilapangan khususnya di level bawah. Munculnya permasalahan terkait upaya kedua institusi dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas sejatinya tidak perlu terjadi apabila masing-masing institusi memiliki pemahaman yang tepat terkait tugas dan tanggung jawabnya. Belum baiknya kerjasama dan koordinasi antara instansi, masing-masing institusi dalam menjalankan kewenangannya masih bersifat sektoral tidak dalam keterpaduan system, masih banyak terjadi gesekan kepentingan secara personal, bergesernya nilai-nilai kejuangan dan semangat pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri, Belum adanya semangat kebersamaan dalam membangun peran TNI-Polri.

Dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional saat ini membutuhkan suatu peran TNI-Polri secara optimal. Didalam meningkatkan peran TNI-Polri diharapkan dapat tercapai : Pertama, Pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing institusi. Kedua, Meniadakan gesekan kepentingan secara personal dalam melaksanakan tugas. Ketiga, Meningkatkan pemantapan Nilai Kejuangan dan semangat pengabdian diharapkan peran TNI-Polri akan mampu dan efektif Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menjamin kelangsungan pembangunan nasional. Dan keempat tercapai semangat kebersamaan antar kedua institusi dalam melaksanakan kerjasama dalam pelaksanaan tugas secara sinergi menciptakan keamanan dan ketertiban sangat diharapkan sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman.

Untuk tercapainya peran TNI-Polri guna mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, diperlukan kebijakan, strategi dan upaya yang meliputi :

1. Mewujudkan pemahaman yang sama terhadap tugas dan fungsi masing-masing institusi.
2. Mewujudkan hubungan yang harmonis antar TNI dan Polri.
3. Mewujudkan nilai-nilai kejuangan dan semangat pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri.
4. Mewujudkan semangat kebersamaan dalam membangun peran TNI-Polri

Perlunya membentuk Undang-undang baru yang mampu memberikan payung hukum yang lebih optimal. Hal tersebut disebabkan karena UU No 2

tahun 2002 tentang Polri dan UU No 34 tahun 2004 tentang TNI saat ini masih menjadi polemik yang berkepanjangan sementara itu dukungan TNI-Polri dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional harus segera dilaksanakan.

Lembaga legislatif/DPR secara intens lebih mengawasi setiap proses legalitas produk perundang-undangan seperti RUU KAMNAS dengan melihat secara cermat, komprehensif dan memposisikan secara proporsional serta profesionalitas berdasarkan aspek "*de facto dan de jure*" yang ada di masyarakat terutama yang menjadi aspek kebutuhan masyarakat dan organisasi. Disamping juga harus mencermati produk acuan universal atau pertimbangan perbandingan hukum/konvensi internasional terkait ide penyusunan **struktur dewan keamanan nasional** yang dapat menjadi rujukan hukum terhadap pelibatan aktor militer haruslah dijadikan sebagai alternatif terakhir. Kondisi pertahanan dan keamanan yang kondusif didukung oleh penguatan kemampuan pertahanan, penguatan keamanan dalam negeri, serta peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan bagian dari proses pemulihan pembangunan secara umum. Sehingga berimplikasi positif dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional.

5. REFERENSI

- Undang – Undang Republik Indonesia tahun 1945
Pancasila
- Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Republik Indonesia
- Undang – Undang No. 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara
- Undang – Undang No. 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Negara Indonesia
- Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Kualitatif.
Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012
- Laili Mawadah (et al), Konsep Wawasan Nusantara
yang Idealis Menuju Cita-Cita Bangsa,
Universitas Negeri Semarang 2008
- Mamduh M. Hanafi, Drs, MBA, Manajemen,
Jogjakarta, Agustus 1997
- R. Sutyo Bakir, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,
Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009
- Robert H. Miles, Macro Organizational Behavior
(Santa Monica, Calif : Goodyear Publishing,
1980)
- DR. Sodarmayanti, M.PD, Restrukturisasi dan
Pemberdayaan Organisasi,
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan
R&D. Bandung: Alfabeta. 2017
- Winardi, 1996, Manajemen Perilaku Organisasi, PT.
Citra Aditya Bhakti, Bandung
- <https://tni.mil.id/view-197475-peran-tni-polri-serta-komponen-bangsa-sangat-dibutuhkan-dalam->

penanganan-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional.html
<https://majoo.id/solusi/detail/produktivitas-adalah#:~:text=Secara%20umum%2C%20produktivitas%20adalah%20kemampuan%20setiap%20orang%2C%20sistem%2C,nilai%20yang%20sama%20dengan%20daya%20produksi%20dan%20keproduktifan.>
<https://goresantanganbangjai.blogspot.com/2019/04/pengertian-transformasi-ekonomi-sektor-industri.html#:~:text=Transformasi%20ekonomi%20adalah%20proses%20perubahan%20struktur%20ekonomi%2C%20ditandai,Regional%20Bruto%20pada%20suatu%20negara%20atau%20suatu%20daerah.>
<http://kmplnmakalah.blogspot.com/2013/04/makalah-terjadinya-konflik-antara-tni.html>
<http://myzone.okezone.com/content/read/2010/02/09/748/>
Indonesia mempertahankan Tanah Air memasuki abat 21
<https://economy.okezone.com/read/2021/02/16/320/2362745/sri-mulyani-ungkap-peranan-penting-tni-polri-dalam-stabilitas-ekonomi-ri?page=2>